

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah atau wilayah provinsi dan setiap daerah atau wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya di dalam tiap daerah kabupaten atau kota terdapat satuan pemerintah terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah di bawah pemerintah kabupaten atau kota.¹

Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, pembangunan desa, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara Indonesia.²

Keberadaan Desa sebagai Lembaga Pemerintahan maupun sebagai entitas kesatuan masyarakat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai Lembaga Pemerintahan, Desa merupakan ujung tombak pemberian layanan kepada masyarakat. Sedangkan sebagai entitas kesatuan masyarakat hukum, Desa merupakan basis sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam yang stabil dan dinamis.

Melihat dari Fungsi Pemerintahan Pusat, Daerah, maupun Desa, fungsi Pemerintahan adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan tersebut terdiri atas pelayanan publik, pelayanan pembangunan, dan pelayanan perlindungan. Pemberian layanan tersebut ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan pembangunan merupakan suatu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam bentuk melakukan pembangunan yang berdampak kepada peningkatan pendapatan warga

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. (Jakarta: Erlangga, 2011) hlm 1

² Bintaro, *Interaksi Desa-Kota Dan Menurut Permasalahannya*. (Jakarta: Ghalis Indonesia, 1989) hlm 13

desa baik langsung maupun tidak langsung. Pembangunan merupakan suatu cara dalam upaya pengembangan wilayah pedesaan yang kemudian dapat menjadikan desa yang mandiri yang dapat mengelola sumber kekayaan desa dengan baik. Dengan pembangunan desa akses pengelolaan kekayaan desa berjalan dengan lancar sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat desa.³

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pembangunan Wilayah Pedesaan tidak terlepas dari peran serta dari seluruh masyarakat yang terdapat di desa. Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan Desa harus dapat menjalankan tugas pokoknya sebagai pemimpin, Melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta membina perekonomian desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 12 ayat 1 menjelaskan tentang pemberdayaan masyarakat Desa yang merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Pada Tahun 2015 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa. Peraturan tersebut menjadi acuan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Percepatan Pembangunan Desa dan dalam pelaksanaannya pemerintah desa dibantu oleh Pendamping Desa.

³ Ibid. Hlm. 104

Struktur Pendampingan Desa dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di bawah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengalami perubahan yang pada mulanya digagas terdapat Pendamping Teknis (PT) berkedudukan di Kabupaten dan ketiadaan Pendamping Lokal Desa (PLD) yang berkedudukan di Desa, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendamping Desa, dimana pada Pasal 4 menyebutkan bahwa Pendamping Desa dilaksanakan oleh Pendamping yang terdiri atas: (a) Tenaga Pendamping Profesional, (b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (c) Pihak Ketiga.⁴

Untuk membantu kerja-kerja pendamping desa yang berkedudukan dikecamatan maka dianggap perlu adanya Pendamping Lokal Desa (PLD) Maka diterbitkanlah Payung Hukum yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Desa Nomor 3 tahun 2015 yaitu Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Pada Pasal 129 Telah Menambahkan Pendamping Lokal Desa (PLD) Termasuk bagian dari Tenaga Pendamping Profesional.

Di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dibawah Pimpinan Bapak Juhari selaku Kepala Pemerintahan Desa dalam menjalankan program-program Desa di dampingi oleh ibu pendampingan desa yaitu Ibu Sumiati selaku Pendamping Lokal Desa dan Ibu Hastati Sebagai Pendamping Desa di tingkat Kecamatan.

⁴ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015. Pasal 4

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Pasal 12, Pendamping Desa melaksanakan tugas mendampingi Desa, meliputi :

1. Mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
2. Mendampingi Desa dalam pelaksanaan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi desa, pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
3. Melakukan peningkatan kapasitas bagi pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
4. Melakukan pengorganisasian di dalam kelompok-kelompok masyarakat desa.
5. Melakukan peningkatan kapasitas kader-kader pemberdayaan masyarakat desa dan mendorong terciptanya kader-kader pembangunan desa yang baru.
6. Mendampingi desa dalam pembangunan kawasan pedesaan secara partisipatif.
7. Melakukan koordinasi pendampingan ditingkat kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh camat kepada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Untuk mewujudkan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa yang lebih baik Pendamping Desa harus menjalankan tugas pokoknya sebagai fasilitator dan mendampingi masyarakat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pada tahun 2016, program pemerintah Desa Watu yaitu melaksanakan Pembangunan Saluran Irigasi di dua dusun yaitu Dusun Langkemme dan Dusun Walattasi. Program dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang bekerja sebagai petani.

Masyarakat Desa Watu merupakan masyarakat yang mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Didukung oleh letak geografisnya yaitu dataran rendah sehingga cocok untuk ditanami berbagai jenis tanaman seperti padi, kacang dan jagung. Selain berprofesi sebagai petani, sebagian masyarakatnya mengadu nasib ke Negeri seberang yaitu Malaysia.

Selain program diatas masyarakat menunggu program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Salah satu kampung yang menunggu program selanjutnya adalah Kampung Sawile. Hal ini dikarenakan program pemerintah merencanakan akan melakukan pembangunan perbaikan jalan di kampung tersebut. Program perbaikan jalan tersebut dilakukan mengingat jalanan di kampung Sawile ketika musim hujan jalannya cukup susah untuk dilewati karena medan yang berlumpur sehingga perlu untuk diperhatikan oleh pemerintah setempat, namun sampai saat ini hal tersebut belum terealisasi.

Untuk mengkaji lebih dalam permasalahan diatas maka penulis mengangkat judul penelitian **“Peran Tenaga Pendamping Desa Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng”**.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Tenaga Pendamping Desa pada Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, dapat disimpulkan bahwa :

1. Peran Tenaga Pendamping Desa Pada Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng telah melaksanakan Proses Pendampingan mulai dari proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan Dan Pemberdayaan masyarakat dengan baik, pendamping desa telah menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya sebagai pendamping di desa dengan memberikan perhatian penuh kepada masyarakat, memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat demi tercapainya proses pelaksanaan pembangunan dengan baik.
2. Kendala yang di hadapi Pendamping Desa Pada Pelaksanan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Watu Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yaitu pada pelaksanaan pembangunan fisik, pendamping desa menjadi terkendala karena faktor cuaca pada proses pemantauan ke lokasi pembangunan dan rendahnya sumber daya manusia pada proses pembekalan tim pelaksana kegiatan. Sedangkan dalam proses pemberdayaan masyarakat kendala yang dihadapi yaitu kurang terampilnya ibu Pkk karena kurangnya pelatihan-pelatihan yang dilakukan di desa seperti pelatihan menjahit yang terkendala karena tidak adanya sarana dan prasarana di desa.